

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1. Sejarah Singkat Perusahaana



Gambar 2. 1 Logo Bank Indonesia

Cikal bakal Bank Sentral Republik Indonesia dimulai dari didirikannya *De Javasche Bank* pada tahun 1828. Di tahun tersebut, pemerintah kerajaan Belanda memberikan octroi atau hak-hak istimewa kepada *De Javasche Bank* (DJB) untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden di wilayah Hindia Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, Bank DJB dilikuidasi oleh pemerintahan Militer Jepang dan digantikan oleh *Nanpo Kaihatsu Ginko* (NKG). Namun pada pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Belanda yang berusaha menguasai kembali Indonesia mendirikan kembali DJB untuk menggantikan NKG. Selain untuk mengambil alih kedudukan Jepang, Belanda atau melalui *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) juga bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi dari pendudukan kedua penjajah, Pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). BNI juga menerbitkan uang dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI) dan dengan keberadaan BNI sebagai milik RI dan DJB milik NICA, membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang (*currency war*).

Pada tahun 1949, berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik

Indonesia menjadi bagian dari RIS. Selain itu, KMB juga menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS, pada masa peralihan kembali menjadi NKRI, DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda.

Memasuki tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai bukti atau wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan untuk melakukan proses nasionalisasi yang mana membeli saham DJB mencapai 97%. Pada tanggal 1 Juli 1953, Pemerintah RI menerbitkan UU No.11 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB Wet Tahun 1922. Sejak saat itu pula Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. UU No.11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur BI sebagai bank sentral. Pada tahun 1968, dikeluarkan UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia yang salah satunya berisi bahwa BI berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara.

Pada tahun 2004, DPR mengesahkan UU No.3 Tahun 2004 yang berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI. Sebagai lembaga yang independen, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BI bebas dari campur tangan Pemerintahan dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut ialah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan terakhir adalah stabilitas sistem keuangan.

## **2.2. Visi Misi**

### **2.2.1. Visi Bank Indonesia**

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia Maju.

### **2.2.2. Misi Bank Indonesia**

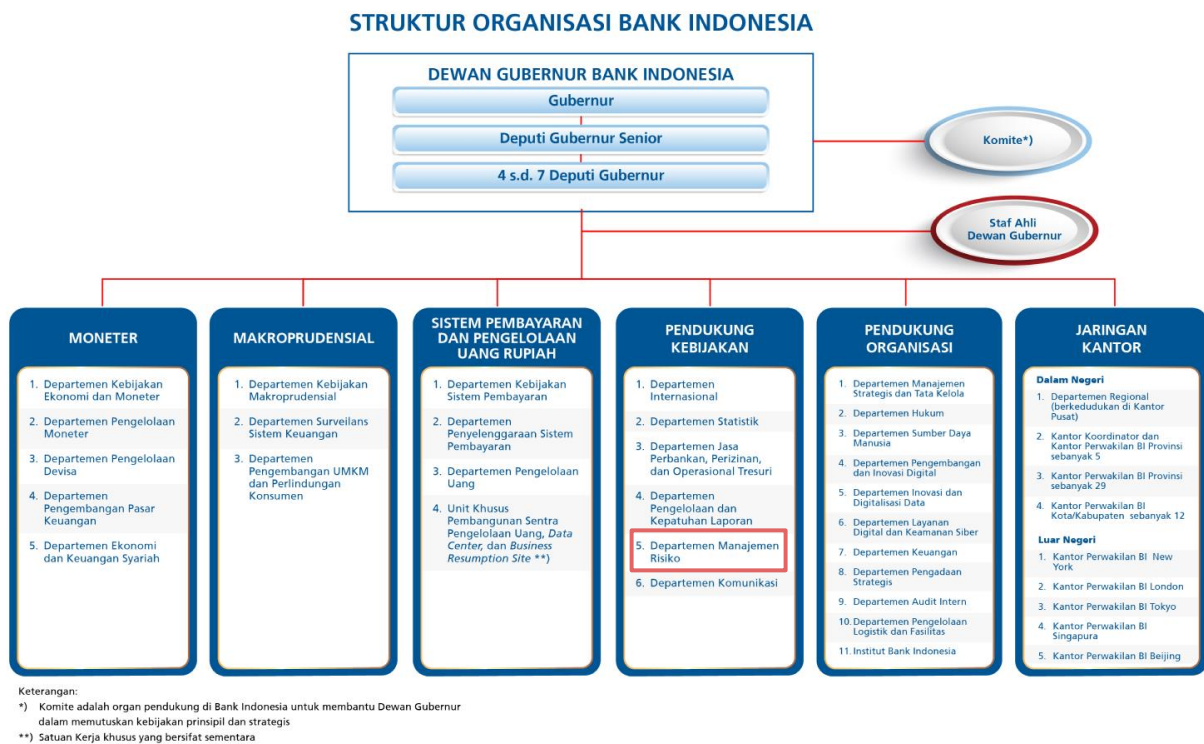
1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan

- Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

## 2.3. Struktur Organisasi Perusahaan

### 2.3.1. Struktur Organisasi Bank Indonesia

Berikut merupakan struktur dari organisasi di Bank Sentral Republik Indonesia :



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi

Bank Indonesia adalah sebuah organisasi yang berfungsi sebagai bank sentral Republik Indonesia, dengan tugas dan tanggung jawab yang mencakup berbagai aspek pengelolaan moneter dan keuangan negara [8]. Sebagai organisasi, Bank Indonesia memiliki struktur, visi, misi, dan tujuan yang terorganisir untuk menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia. Struktur organisasi Bank Indonesia secara keseluruhan meliputi Dewan Gubernur Bank Indonesia yang terdiri dari Gubernur, Deputi Gubernur, 4 sampai 7 Gubernur. Dalam menjaga kestabilan

moneter dan fungsinya, Bank Indonesia terdiri dari beberapa departemen yaitu Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Departemen Pengelolaan Moneter, Departemen Pengelolaan Devisa, Departemen Pengembangan Pasar Keuangan, dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selain itu, dalam menjalankan fungsi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia terdiri dari Departemen Kebijakan Makroprudensial, Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Selanjutnya dalam melakukan fungsi penjagaan, pengelolaan, dan sistem pembayaran, dilakukan oleh empat departemen yaitu Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Departemen Pengelolaan Uang, dan Unit Khusus Pengembangan Sentra Pengelolaan Uang. Lain halnya untuk Departemen Internasional, Departemen Statistik, Departemen Jasa Perbankan Perizinan dan Operasional Tresuri, Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Departemen Komunikasi, dan Departemen Manajemen Risiko menjalankan tugasnya sebagai pendukung kebijakan di Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki Departemen-departemen sebagai pendukung organisasi yaitu Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Departemen Hukum, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital, Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data, Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber, Departemen Keuangan, Departemen Pengadaan Strategis, Departemen Audit Intern, Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas, dan Institut Bank Indonesia. Terakhir, Bank Indonesia juga memiliki jaringan kantor dalam negeri maupun luar negeri. Jaringan kantor dalam negeri tersebar di seluruh Indonesia di hampir seluruh provinsi nusantara. Untuk jaringan kantor luar negeri, terdapat di New York, London, Tokyo, Singapura, dan Beijing.

### **2.3.2. Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko**

Struktur organisasi Departemen Manajemen Risiko dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 3 Struktur Departemen Manajemen Risiko

Struktur organisasi Departemen Manajemen Risiko terdiri dari dua jenis utama yaitu Group Manajemen Risiko Enterprise dan Group Manajemen Risiko Operasional. GMRE atau Group Manajemen Risiko Enterprise berfokus pada risiko strategis yang dapat mempengaruhi seluruh organisasi dan pencapaian tujuan jangka panjangnya, seperti risiko kebijakan, internal, informasi, dan devisa. Group ini sendiri terdiri dari Kelokpok Asesmen Risiko BI & Risiko Kebijakan, Kelokpok Asesmen Risiko Major Project, Kelokpok Pengembangan Manajemen Risiko Pengolahan Data dan Informasi, serta Divisi Manajemen Risiko Pengelolaan Devisa. Disisi lain, Group Manajemen Risiko Operasional atau GMRO memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua risiko operasional dikelola dengan baik untuk menjaga kelangsungan operasional dan stabilitas bank. Grup ini terdiri dari beberapa divisi dan unit yang masing-masing memiliki fokus spesifik dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai jenis risiko operasional. GMRO sendiri terdiri dari Divisi Manajemen Risiko Pengelolaan Moneter & Pasar Keuangan, Kelokpok Pengelolaan Manajemen Keberlangsungan Tugas BI, Unit Manajemen Intern - DMR, dan Kelokpok Asesmen Financial Risk, Compliance, Cyber & Fraud.

Secara keseluruhan, tugas pokok dari Departemen Manajemen Risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan Manajemen Risiko melalui kegiatan:
  - i. Melaksanakan Manajemen Risiko terintegrasi dan mengkoordinasikan pemantauan Risiko strategis terhadap pencapaian program strategis / Risiko level *enterprise* / BI-wide (termasuk Risiko kecurangan, Risiko kepatuhan dan Risiko siber);
  - ii. Memfasilitasi dan memberikan konsultasi serta evaluasi dan pemantauan pengelolaan Risiko proses bisnis Satuan Kerja di BI (termasuk melaksanakan peran *second line of defense*)
  - iii. Melaksanakan pengelolaan Risiko secara *four eyes principles* untuk fungsi pengelolaan cadangan devisa, pengelolaan moneter, dan pengadaan dengan nilai tertentu;
  - iv. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan protokol Manajemen Keberlangsungan Tugas BI;
  - v. Melaksanakan kerangka kerja, kebijakan, strategi, dan standar/kriteria metodologi / *tools* Manajemen Risiko BI; dan
  - vi. Melaksanakan strategi pengembangan efektivitas fungsi Internal Control Officer (ICO) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait Manajemen Risiko;
- b. Menyusun rekomendasi terkait:
  - i. Strategi Manajemen Risiko yang mampu mengawal kebijakan strategis BI;
  - ii. Penetapan Risiko strategis (Risiko level *enterprise*) terhadap pencapaian program strategis dan mitigasi Risiko strategis (Risiko level *enterprise*) yang terintegrasi dengan fungsi *planning, budgeting, risk & audit strategic*;
  - iii. Mitigasi Risiko proses bisnis Satuan Kerja di BI (termasuk sebagai peran *second line of defense*);
  - iv. Pengelolaan Risiko secara *four eyes principles* untuk fungsi pengelolaan cadangan devisa, pengelolaan moneter dan pengadaan dengan nilai tertentu;
  - v. Perencanaan program kerja dan protokol Keberlangsungan Tugas BI,

- serta rekomendasi pengaktifan dan penonaktifan kondisi insiden;
- vi. Kerangka kerja, kebijakan, dan standar/kriteria, metodologi/tools Manajemen Risiko BI;
  - vii. Strategi pengembangan efektivitas fungsi Internal Control Officer (ICO) dan peningkatan kapasitas SDM terkait Manajemen Risiko; dan
  - viii. Penyempurnaan/pengembangan sistem informasi Manajemen Risiko;



UMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA